

IMPLEMENTASI PASAL 9 *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (ICESCR) DALAM HAL KEWAJIBAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI OLAHRAGAWAN DI INDONESIA

INTISARI

Oleh

Sabrina Nadilla¹ dan Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan kewajiban Indonesia setelah melakukan akses terhadap *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) khususnya terkait Pasal 9 yakni hak atas jaminan sosial dan mengetahui sejauh mana implementasi Pasal 9 ICESCR tersebut terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi olahragawan di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), peraturan perundang-undangan, buku serta jurnal dan publikasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas jaminan sosial. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber antara lain Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia, Peneliti dari KOMNAS HAM, Kepala Sub-bagian Hukum Deputi III Bidang Kebudayaan Olahraga KEMENPORA Republik Indonesia, Bendahara Umum Komite Olimpiade Indonesia, dan Staff Divisi Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Sedangkan wawancara terhadap responden yakni olahragawan dari Program Indonesia Emas (PRIMA) cabang renang dan anggota Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) DKI Jakarta cabang selam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa seperti HAM lainnya, kewajiban Indonesia terhadap pemenuhan hak atas jaminan sosial terdiri atas tiga hal, yakni *obligation to respect*, *obligation to protect* dan *obligation to fulfill*. Dalam pemenuhan kewajiban tersebut, dikenal konsep *progressive realization* di mana negara pihak dapat melakukan upaya-upaya secara bertahap. Sedangkan terkait pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi olahragawan di Indonesia, masih ditemukan faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak tersebut seperti tidak adanya kebijakan yang mengatur secara jelas, kurangnya inisiatif dari para instansi olahraga dan posisi olahragawan yang lemah di mata hukum. Rekomendasi yang dapat diberikan salah satunya adalah untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin status hukum dari olahragawan beserta pemenuhan atas hak-hak yang dimilikinya.

Kata kunci: Implementasi, ICESCR, Pemenuhan Hak, Jaminan Sosial, Olahragawan

¹ Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada

THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 9 INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (ICESCR) REGARDING FULFILLMENT OF RIGHTS TO SOCIAL SECURITY FOR ATHLETES IN INDONESIA

ABSTRACT

By

Sabrina Nadilla³ and Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.⁴

This research aims to identify Indonesia's obligations and responsibility after acceded the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) especially Article 9 regarding the rights to social security and to identify the implementation of the Article 9 in terms of rights to social security for the athletes in Indonesia.

The research method in this research is using empirical-juridical approach. The library research is done by reviewing the *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), law and regulations, books, journals and publications concerning the rights to social security. The field research is done by interviewing the research person, including the Chief of Ikatan Atlet Nasional Indonesia, Researchers from the Indonesia Nasional Commission on Human Rights (KOMNAS HAM), Head of Legal Sub-section Deputy III Bidang Pembudayaan Olahraga the Indonesia Ministry of Youth and Sports, Treasurer of Indonesia National Olympic Committee and Legal Staff of BPJS Ketenagakerjaan Pusat. There are also interviews to respondents including Indonesia's PRIMA National Swimmer and DKI Jakarta's Local Diver.

According to the result of this research, Indonesia as the state member have three obligations as follows: obligation to respect, obligation to protect and obligation to fulfill, just like any other branches of human rights. The fulfillment of those obligations is expected to be done step-by-step, the concept is known as the progressive realization. There are still lack of fulfilment of the rights to social security for athletes in Indonesia, and it is caused by three factors, including little to no regulations regarding the issues, lack of initiative from the sport organizations and the athlete's legal status. This research recommends to begin legislation process to ensure the athletes' legal status and also the fulfillment of the athletes' rights.

Keyword: Implementation, ICESCR, Rights' Fulfilment, Rights to Social Security, Athletes

³ Bachelor of Law Student, International Law Department, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer at International Law Department, Universitas Gadjah Mada